

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sepanjang tahun 2000-an, terdapat beberapa film Indonesia yang menuai kontroversi. Beberapa di antaranya bahkan mendapat reaksi keras karena isi pesan dan cara penuturan ceritanya dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat dan dikhawatirkan memberi contoh yang buruk bagi masyarakat. Film-film itu antara lain *Buruan Cium Gue* (2004), *Virgin: Ketika Keperawanan Dipertanyakan* (2004), *Shinta Obong* (2005), *Mau Lagi (ML)* (2008), *Drupadi* (2008), *Lastri* (2008), *Perempuan Berkalung Sorban* (2008), *Romeo-Juliet* (2009), *Suster Keramas* (2009), dan *Hantu Puncak Datang Bulan* (2010).

Kontroversi terhadap film-film tersebut menjadi menarik karena sebagian besar protes atau kontra diserukan oleh kelompok-kelompok berbasis agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pihak yang sangat sering memberikan komentar terhadap film-film yang dianggap bernuansa seks atau pornografi seperti *Buruan Cium Gue*, *Virgin*, *Mau Lagi (ML)*, *Suster Keramas*, dan sebagainya. MUI dan beberapa kalangan muslim juga memprotes film *Perempuan Berkalung Sorban* yang dianggap memberikan citra buruk terhadap agama Islam. Beberapa film yang mengambil kebudayaan Hindu sebagai latar belakangnya seperti *Shinta Obong* (yang berganti judul menjadi *Opera Jawa*) dan *Drupadi* diprotes oleh World Hindu Youth

Organization (WHYO). WHYO menganggap visualisasi figur-figur Hindu dalam film *Shinta Obong* seperti Rama dan Sinta tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Ramayana. Sementara itu isi film *Drupadi* dianggap tidak sesuai dengan Kitab Weda<sup>1</sup>.

*Buruan Cium Gue* merupakan salah satu film yang banyak sekali menimbulkan kontroversi. Film yang dibuat pada tahun 2004 ini dianggap provokatif dan meresahkan masyarakat dengan adegan-adegannya yang dianggap vulgar. Film ini sempat ditarik dari peredaran. *Setelah pertemuannya dengan Aa Gym (KH Abdullah Gymnastiar) dan Din Syamsudin (MUI) pada Agustus 2004, Raam Punjabi menarik film ini dari peredaran. Aa Gym bahkan sempat mengomentari judul film ini sebagai "ajakan berzinah"* (Kristanto, 2005: 415). Namun, reaksi yang lain muncul dari sekelompok seniman, wartawan, intelektual yang menamakan diri Ekspresi (Eksponen Pendukung Kebebasan Berekspresi). Mereka menentang penarikan film itu dari peredaran. Film ini akhirnya diedarkan kembali dengan judul *Satu Kecupan* pada Maret 2005 setelah dilakukan beberapa revisi (Kristanto, 2005: 415).

Walaupun kontroversinya tidak seramai *Buruan Cium Gue*, film *Virgin (Ketika Keperawanan Dipertanyakan)* juga mendapat banyak kecaman. Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, memerintahkan penghentian

---

<sup>1</sup> Diambil dari tulisan Han Kristi yang berjudul "Film-film Indonesia Menuai Kontroversi!" (<http://movie.detikhot.com/read/2009/05/04/190210/1126152/620/film-film-indonesia-menuai-kontroversi>).

penayangan dan penarikan peredaran film *Virgin* dari bioskop di Makassar setelah film itu diprotes berbagai elemen masyarakat seperti MUI Makassar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Komunitas Film Makassar, dan Pemberdayaan Perempuan Pemkot Makassar. Tindakan ini berdasarkan alasan bahwa film itu mengekspos seks bebas (*free sex*) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya orang Makassar. Ilham Arif Sirajuddin juga mengkhawatirkan film itu akan membawa nilai-nilai negatif bagi remaja yang menontonnya<sup>2</sup>.

Contoh di atas memperlihatkan bahwa kecaman-kecaman, kritik, atau pujian terhadap film menunjukkan setidaknya dua hal; yang pertama penonton merupakan pengonsumsi yang aktif, dan yang kedua, latar belakang agama berpengaruh besar pada pemaknaan seseorang terhadap sebuah film. Sebagai pengonsumsi yang aktif, penonton memberikan respons-responsnya terhadap pesan dalam sebuah film. Ketakutan seseorang atau sekelompok orang terhadap dampak film di saat yang sama justru memperlihatkan mereka tidak menerima mentah-mentah pesan yang disampaikan. Teks pada dasarnya bersifat dialogis karena ia memberi kesempatan kepada audiens untuk meresponsnya dengan berbagai cara sesuai dengan nilai yang dipegang audiens (Tester, 2003: 105). Oleh karena itulah latar belakang agama berpengaruh terhadap cara audiens memaknai film.

Keragaman respons penonton berkaitan dengan latar belakang agamanya terhadap pesan dalam film juga terlihat dalam berbagai tanggapan

---

<sup>2</sup> Diambil dari artikel "Film *Virgin* Ditarik dari Seluruh Bioskop" ([http://swaramuslim.net/more.php?id=A2571\\_0\\_1\\_0\\_M](http://swaramuslim.net/more.php?id=A2571_0_1_0_M)).

tentang film *Perempuan Berkalung Sorban*. Film ini menarik dan menjadi kontroversial karena perspektifnya yang berbeda tentang Islam dibandingkan film-film bernuansa Islam yang lain. Sebagian besar film lain bernuansa Islam seperti *Kun Fayakun*<sup>3</sup> (2007), *Ayat-ayat Cinta*<sup>4</sup> (2008), *Syahadat Cinta*<sup>5</sup> (2008), *Sang Murabbi*<sup>6</sup> (2008), serta *Ketika Cinta Bertasbih 1* dan *Ketika Cinta Bertasbih 2*<sup>7</sup> (2009) tidak pernah memunculkan kritik terhadap penafsiran agama Islam, apalagi yang menyangkut hubungan antara perempuan, laki-laki, dan Islam. Sementara itu, *Perempuan Berkalung Sorban*, selain membawa nilai positif ajaran Islam dalam karakter beberapa orang, menampilkan juga sisi-sisi negatif penafsiran ajaran Islam yang kemudian menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Karena hal itu

<sup>3</sup> *Kun Fayakun* bercerita tentang seorang tukang kaca keliling yang sederhana, sabar, gigih berjuang untuk keluarganya, tabah, dan ikhlas. Ia memiliki seorang istri yang digambarkan setia dan saleh. Di akhir cerita, penjual kaca ini menjadi seorang pengusaha kaca yang sukses karena ketekunannya.

<sup>4</sup> Tokoh utama dalam *Ayat-ayat Cinta* adalah Fachri, seorang pemuda Indonesia yang menempuh pendidikan di Al-Azhar. Ia adalah seseorang yang cerdas, sopan, taat beribadah, dan disukai banyak perempuan. Konflik muncul ketika Fachri difitnah memperkosa seorang perempuan yang pernah ditolungnya dan ketika menjalani poligami. Film ini adalah film *happy-ending*; semua konflik yang dialami Fachri akhirnya teratasi dengan menjadikan beberapa ajaran agama sebagai dasar pencarian solusinya.

<sup>5</sup> *Syahadat Cinta* menggunakan formula film-film religius tentang pertobatan. Di awal cerita tokoh utama, Iqbal, dikisahkan sebagai seseorang yang Bengal, tukang mabuk, dan sering berkelahi. Pertobatannya dimulai dengan momen ketidaksengajaannya mendorong ibunya dari tangga ketika mabuk. Setelah itu ia masuk pondok pesantren. Walaupun begitu, sikap kasarnya kadang-kadang masih muncul. Ia diusir kiai karena memaki seorang perempuan di pesantren, yang ternyata adalah cucu kiai tersebut. Ia "menemukan" Tuhan kemudian setelah pertemuannya dengan seorang ibu yang miskin dan saleh.

<sup>6</sup> *Sang Murabbi* merupakan film biografi yang menceritakan kehidupan almarhum Kiai Haji Ahmad Abdullah yang meninggal pada 2005. Ahmad Abdullah digambarkan sebagai seseorang yang cerdas, taat beribadah, dan gigih memperjuangkan penyebaran nilai-nilai Islam, salah satunya dengan membentuk kelompok teater. Ia meninggal karena gangguan kesehatan ketika akan mengambil wudhu di masjid.

<sup>7</sup> *Ketika Cinta Bertasbih 1* dan *Ketika Cinta Bertasbih 2* menceritakan kehidupan seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan gigih bernama Azzam yang bersekolah di Al Azhar. Konflik dihadirkan dengan kebingungan Azzam dalam hal memilih perempuan yang cocok untuknya, Eliana yang cerdas dan cantik atau Anna yang cantik, cerdas, berjilbab, dan saleh. Film ini pun adalah film *happy ending* yang ditutup dengan pernikahan Azzam dan Anna.

jugalah film yang dibuat oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2008 berdasarkan novel karya Abidah El Khalieqy ini menimbulkan kontroversi.

*Perempuan Berkalung Sorban* bercerita tentang perlawanan Annisa, seorang anak kiai, terhadap konstruksi agama Islam tentang perempuan yang menghambatnya untuk berkembang. Annisa, seorang anak kiai yang memiliki pesantren bernama Salafiyah al-Huda, mencoba melakukan protes atas norma-norma berdasarkan ajaran agama Islam yang diterapkan dalam pesantren itu. Protes-protesnya timbul misalnya ketika ia dilarang naik kuda karena perempuan, batal menjadi ketua kelas karena seorang ketua harus laki-laki, tidak jadi kuliah karena tidak baik bagi seorang perempuan yang belum memiliki muhrim, dan sebagainya. Ia juga memprotes penafsiran ayat atau hadis yang terkesan tidak memihak kepada perempuan.

*Perempuan Berkalung Sorban* mendapat banyak tanggapan dari penontonnya. Beberapa orang tidak menyukai film ini. Mereka mengecam film ini dengan alasan dinilai menyudutkan agama Islam karena menggambarkan pengekangan hak dan kebebasan perempuan yang hidup dalam sebuah pesantren<sup>8</sup>. Deddy Mizwar bahkan menyatakan bahwa film ini adalah film gagal karena menurutnya *Perempuan Berkalung Sorban* menimbulkan kebencian, kemarahan, dan hasutan sesudah menontonnya. Selain itu, ia beranggapan bahwa pembuat film tidak menguasai materi tentang Islam. Tifatul Sembiring, ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

---

<sup>8</sup>Diambil dari artikel berjudul "Deddy Mizwar Minta Masyarakat Maafkan Hanung" (<http://entertainment.kompas.com/read/2009/02/13/e193619/deddy.mizwar.minta.masyarakat.maafkan.hanung.>).

mendukung seruan Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yakub, agar film itu dikoreksi dan diboikot.<sup>9</sup>

Sementara itu, Siti Musdah Mulia, staf ahli Departemen Agama, tidak setuju dengan reaksi tentang keinginan beberapa orang untuk memboikot film *Perempuan Berkalung Sorban*. Ia menilai film itu justru mengungkapkan realitas penindasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan agama. Ia mengatakan bahwa film ini melawan pandangan salah yang selama ini ada di masyarakat. Ia mengakui bahwa hal itu memang terjadi dan umat Islam tidak perlu marah bila dikritik. Hal itu juga diamini oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah, ia pun membenarkan bahwa film ini mengangkat realitas, banyak yang masih berpandangan bahwa Islam membedakan hak laki-laki dan perempuan<sup>10</sup>.

Film *Perempuan Berkalung Sorban* mengangkat persoalan gender dan seksualitas dalam kaitannya dengan agama Islam. Di Indonesia, pemahaman wacana gender dan seksualitas dalam konteks agama Islam menjadi sangat penting karena Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Wacana tentang gender dan seksualitas juga ditafsirkan dan dirumuskan dalam terminologi keagamaan, sehingga kemudian memiliki legitimasi kultural untuk diterima atau ditolak secara halus oleh kalangan muslim.

---

<sup>9</sup> Diambil dari artikel berjudul "Film Perempuan Berkalung Sorban Menuai Kecaman" (<http://muhsinlabib.wordpress.com/2009/02/06/film-perempuan-berkalung-sorban-menuai-kecaman/>).

<sup>10</sup> Diambil dari artikel yang ditulis oleh Niken Widya Yunita berjudul "Musdah Mulia: Tak Perlu Ditarik, Jangan Gampang Marah Kalau Dikritik" (<http://www.detiknews.com/read/2009/02/06/174610/1080758/10/musdah-mulia-tak-perlu-ditarik-jangan-gampang-marah-kalau-dikritik>).

Ketika pemikiran agama telanjur memberikan legitimasi terhadap sistem kekerabatan patriarki dan pola pembagian kerja secara seksual, wacana gender akan bersentuhan dengan masalah keagamaan. Selama ini agama dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahkan, agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya *status quo* perempuan sebagai *the second sex* (Umar, 2002; dalam Sukri, 2002: 3).

Teks media, termasuk film, hanya akan menjadi bermakna setelah ia dikonsumsi oleh penontonnya, karenanya makna berada dalam hubungan antara khalayak dan teks. Penonton adalah elemen yang dianggap paling penting.

Pentingnya penonton sebagai pengonsumsi aktif membuat penelitian ini berfokus pada penonton. Penelitian khalayak menempatkan pengalaman manusia sebagai pusat penelitiannya. Seperti yang dikatakan Jane Stokes dalam bukunya *How To Do Media and Cultural Studies*, meneliti khalayak memungkinkan penulis mengetahui manfaat-manfaat sosial media. Mencermati bagaimana teks media diterima membantu untuk memahami dampak media serta apa yang diperoleh orang-orang dan apa yang mereka sukai atau tidak sukai dari media (Stokes, 2003: 148).

Penelitian khalayak salah satunya pernah dilakukan oleh Radway dengan judul *Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature* (Radway, 1984; dalam Stokes, 2003: 152). Ini adalah salah satu studi pemaknaan teks dari sudut pandang pembaca. Ia mewawancarai para

pembaca novel Harlequin Romance untuk mendiskusikan novel-novel romantis. Ia menafsirkan bahwa apa yang tampaknya menurut banyak kritikus sangat negatif (genre-genre yang dianggap tidak bermutu atau berselera rendah) serta merugikan figur-figur perempuan, justru menjadi model yang kuat dan positif (Stokes, 2003: 153).

Makna, menurut Radway, terletak bukan pada teks itu sendiri, melainkan pada bagaimana pembaca menafsirkan teks. Karya ini merupakan salah satu penelitian yang dimulai dari posisi pemberdayaan (Stokes, 2003: 153). Pada tahun 1989, seorang peneliti lain, Jackie Stacey, meneliti kebiasaan menonton di bioskop dan sikap-sikap yang terkait dengan hal itu. Ia kembali menegaskan bahwa kuasa untuk menafsirkan teks terletak pada pembaca, bukan pada produser (Stokes, 2003: 153).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana penonton muslim memandang isu gender dan seksualitas dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*. Penulis mengkhususkan penelitian ini untuk penonton muslim karena isu gender dan seksualitas dalam film ini sangat kontekstual, dan kesamaan latar belakang dalam hal agama menjadi penting untuk memahami isu gender dan seksualitas dalam Islam secara lebih dalam.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana pembacaan penonton muslim terhadap kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui pembacaan penonton muslim terhadap kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas.

### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

- Melihat keragaman pemaknaan penonton film terhadap sebuah teks.
- Memberikan sumbangan penelitian bagi UAJY, khususnya untuk tema gender dalam wacana keislaman.

### 1.5. KERANGKA TEORI

#### 1.5.1. Pendekatan *Cultural Studies* dalam Studi Khalayak Aktif

Penelitian pembacaan penonton muslim terhadap kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang persoalan gender dan seksualitas ini berfokus pada audiens. Karenanya, diperlukan sebuah pendekatan untuk memahami bagaimana audiens menciptakan makna atas sebuah teks. Pendekatan *cultural studies* akan digunakan dalam penelitian ini untuk memahami khalayak sebagai entitas yang aktif.

Pertama-tama, harus dipahami bahwa budaya dalam *cultural studies* didefinisikan secara politis, yaitu sebagai teks dan praktis hidup sehari-hari. *Cultural studies* juga menganggap budaya bersifat politis dalam pengertian yang spesifik, yaitu sebagai ranah konflik dan pergumulan. *Cultural studies*

dilihat sebagai situs penting bagi produksi dan reproduksi hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Storey, 2007: 2-3).

*Cultural studies* berakar pada marxisme. Marxisme menjelaskan *cultural studies* dalam dua cara fundamental. Pertama, untuk memahami makna-makna teks atau praktik budaya, kita harus menganalisisnya dalam konteks sosial dan historis produksi dan konsumsinya. Sejarah dan budaya bukanlah entitas yang terpisah karena sejarah teks/praktik dibubuhkan satu sama lain dan dilekatkan bersama sebagai bagian dari proses yang sama. Teks budaya tidak sekadar merefleksikan sejarah, melainkan membuat sejarah dan merupakan bagian dari proses dan praktik tersebut (Storey, 2007: 3-4).

Asumsi kedua yang diambil dari marxisme adalah pengenalan bahwa masyarakat industrial kapitalis adalah masyarakat yang disekat-sekat secara tidak adil menurut, misalnya, garis etnis, gender, keturunan, dan kelas. Dalam *cultural studies*, budaya merupakan salah satu wilayah prinsipil di mana penyekatan ini ditegakkan dan dipertandingkan: budaya adalah suatu ranah tempat berlangsungnya pertarungan terus-menerus atas makna, di mana kelompok-kelompok subordinat mencoba menentang penimpaan makna yang sarat akan kepentingan kelompok-kelompok dominan. Inilah yang membuat budaya bersifat ideologis (Storey, 2007: 4-5).

Ideologi merupakan konsep sentral dalam *cultural studies*. Hall mencoba menjelaskannya dari kerangka kerja konsep hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci. Ia berpendapat bahwa teks dan praktik budaya tidak dibubuhkan bersama makna dan tidak dijamin secara pasti oleh tujuan-

tujuan produksi; makna senantiasa akibat dari tindakan “artikulasi”, sebuah proses “praktik produksi” yang sifatnya aktif. Proses ini disebut “artikulasi” sebab makna harus diekspresikan, namun ia senantiasa diekspresikan dalam konteks yang spesifik, dalam momen historis yang spesifik, di dalam sebuah wacana yang spesifik (Storey, 2007: 5).

Hall juga mendasarkan pendapatnya pada karya Volosinov (1973; dalam Storey, 2007: 5). Volosinov berpendapat bahwa makna senantiasa ditentukan oleh konteks artikulasi. Teks dan praktik budaya bersifat “multiaksentual”; teks dan praktik budaya bisa diartikulasikan dengan “aksen” yang berbeda oleh orang yang berbeda dalam konteks yang berbeda untuk tujuan politis yang berbeda. Oleh karenanya, makna adalah sebuah produksi sosial. Sebuah teks, praktik, atau peristiwa, adalah tempat di mana artikulasi makna yang beragam bisa berlangsung. Dan karena makna yang berbeda bisa dibubuhkan pada teks atau peristiwa yang sama, makna senantiasa merupakan tempat yang potensial terhadap konflik sehingga wilayah budaya menurut *cultural studies* merupakan tempat pergumulan ideologis yang utama; salah satu tempat di mana hegemoni dimenangkan atau dikalahkan (Storey, 2007: 5-6).

*Cultural studies* menegaskan bahwa terdapat dialektika antara proses produksi dan aktivitas konsumsi. Konsumen selalu berhadapan dengan sebuah teks atau praktik sebagai akibat dari kondisi produksi yang sudah pasti. Dengan cara yang sama, teks dan praktik dihadapkan dengan seorang konsumen yang pada praktiknya memproduksi serangkaian kemungkinan

maknawi (Storey, 2007: 6-7). Pemahaman tentang hubungan produksi yang konsumsi teks (yang juga merupakan aktivitas reproduksi atas makna) dapat dirangkum dalam kutipan dari Lawrence Grossberg berikut ini:

Kita harus mengakui bahwa, sebagian besar, hubungan antara khalayak dan teks populer adalah hubungan yang aktif dan produktif. Makna teks tidak diberikan pada beberapa rangkaian kode yang tersedia secara terpisah di mana kita bisa mengonsultasikannya kapan saja kita sempat. Sebuah teks tidak menyanggah politik atau maknanya sendiri yang telah ada dalam dirinya sendiri; tak ada teks yang mampu menjamin efek apa yang akan terjadi. Orang-orang terus-menerus bersusah payah, bukan semata-mata menyimak dengan teliti apa makna sebuah teks, tetapi untuk membuat sesuatu yang terkait dengan kehidupan, pengalaman, kebutuhan, serta hasrat mereka sendiri menjadi bermakna. Teks yang sama akan bermakna berbeda bagi orang yang berbeda, tergantung pada bagaimana teks itu diinterpretasikan. Dan orang yang berbeda punya sumber daya interpretatif yang berbeda. Sebuah teks hanya bisa bermakna sesuatu dalam konteks pengalaman dan situasi khalayaknya. Yang tak kalah penting, teks tidak mendefinisikan bagaimana teks-teks itu digunakan atau fungsi-fungsi apa yang bisa dijalankan, sebelumnya. Teks-teks bisa mempunyai kegunaan bagi orang yang berbeda dalam konteks yang berbeda... Bagaimana sebuah teks yang spesifik digunakan, bagaimana teks itu diinterpretasikan, bagaimana ia berfungsi bagi khalayaknya – semua ini terkait erat lewat pergumulan khalayak yang terus-menerus guna memahami dirinya sendiri dan dunianya, bahkan lebih dari itu, mewujudkan tempat yang lebih baik bagi dirinya sendiri di dunia (Grossberg, 1992b: 52-3; dalam Storey, 2007: 8).

Pendekatan *cultural studies* mengubah asumsi-asumsi sebelumnya yang menganggap khalayak pasif. Dalam tradisi tersebut, penelitian-penelitian berfokus pada efek media. Morley menyebutnya sebagai tradisi pesimistis yang naif karena media seakan-akan berdampak langsung dan tidak termediasi terhadap audiensnya (Morley, 1999: 121). Morley merekomendasikan cara berpikir baru yang mensubstitusi kebiasaan berpikir “apa yang media lakukan terhadap audiensnya” menjadi “apa yang audiens lakukan dengan media”.

Research of the audience-based has been largely structural-functional in orientation, focusing on the social characteristics of different audiences, reflecting their different degrees of ‘openness’ to the messages they received (Morley, 1999: 121).

Studi berbasis khalayak menekankan fakta penting bahwa khalayak yang berbeda menggunakan dan menginterpretasikan teks dengan cara yang berbeda dengan yang diintensikan oleh komunikator (pembuat teks) dan juga berbeda dengan khalayak yang lain. Hal ini menegaskan peran khalayak dalam mengonstruksikan makna.

The meaning of the text will be constructed differently according to the discourses (knowledges, prejudices, resistance, etc) brought to bear on the text by the reader and the crucial factor in the encounter of audience/subject and text will be the range of discourses at the disposal of the audience. (Morley, 1999: 139)

### **1.5.2. Studi Resepsi dalam Film**

Sebuah teks akan selalu melibatkan proses pemaknaan, baik dalam proses produksi maupun konsumsinya, begitu juga dengan film. Dalam artikelnya yang berjudul "Cinema as Institution", Searle Kochberg mengatakan bahwa film tidak hidup dalam ruang hampa. Film disusun, diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial dan ekonomi yang spesifik (Kochberg, 1996; dalam Nelmes, 1996: 8). Studi mendasar dalam melihat sinema sebagai institusi, menurut Kochberg, adalah studi tentang audiens (Kochberg, 1996; dalam Nelmes, 1996: 8). Dalam menonton film, penonton dikondisikan untuk masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh pembuat film. Dengan menggunakan fotografi, suara, proses editing, efek khusus, dan karakterisasi yang hidup, film mencoba memersuasi audiensnya untuk percaya pada dunia yang dibangun dalam film itu (Freeland dan Wartenberg, 1995: 3).

Film mencoba menyampaikan pesan untuk penontonnya. Namun, makna dalam film tidak dengan sederhana terkandung di dalamnya. Tidak ada film yang memiliki satu makna yang dapat ditangkap ‘dengan benar’ oleh semua penontonnya. Makna sebuah film diproduksi oleh penonton melalui interaksi penonton dengan film tersebut. Banyak hal mempengaruhi interaksi itu, misalnya latar belakang, minat, bagaimana film itu dibuat dan dipasarkan, bagaimana orang lain meresponsnya, serta kondisi kultural (Lehman dan Luhr, 2003: 169). Sebuah film yang sama dapat bermakna berbeda bagi penonton yang berbeda dalam waktu yang sama—atau sebuah film juga dapat memiliki makna yang berbeda bagi penonton yang sama dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada audiens menjadi penting.

In recent years, the study and teaching of film has become increasingly concerned with these other—particularly the cultural and industrial—factors in order to examine the social origins of audiences’ readings of film texts. How films are understood by their audiences is more than a problem of film form, and this fact is increasingly reflected in the concerns of contemporary film studies (Turner, 2002: 11).

Studi resepsi (*reception studies*) menyelidiki berbagai respons penonton terhadap film (atau teks lain) serta alasan-alasan untuk respons-respons itu (Lehman dan Luhr, 2003: 169). Makna dalam film tidak pernah tetap, melainkan dibentuk melalui konteks menonton dan dapat berubah sesuai dengan penontonnya. Dalam studi resepsi, audiens adalah partisipan aktif—makna tidak ditentukan oleh teks, melainkan hasil proses interaksi antara teks dan konteks (Lehman dan Luhr, 2003: 169).

Studi resepsi membantu untuk menghindari generalisasi simplistik tentang makna tunggal sebuah film, atau dugaan bahwa hanya ada

satu makna yang dapat dipercaya (Lehman dan Luhr, 2003: 169). Ini membantu memahami berbagai cara tentang bagaimana film dipahami dalam waktu yang berbeda oleh orang-orang dari kelas, ras, etnis, gender, orientasi seksual, dan sebagainya yang berbeda.

### 1.5.3. *Encoding-Decoding* Stuart Hall

Teori yang dipakai penulis untuk melihat pemaknaan penonton atas teks film dalam penelitian ini diadaptasi dari teori *encoding* dan *decoding* yang dicetuskan oleh Stuart Hall. Teori ini pertama kali digunakan dalam konteks menonton televisi. Penulis akan menggunakan pendekatan *encoding-decoding* ini untuk melihat resepsi penonton film dan memfokuskannya pada posisi *decoding* penonton. Pendekatan ini dipakai karena berasumsi bahwa aspek terpenting dalam aktivitas menonton adalah pada audiens, yang bisa memberi berbagai macam makna atas teks media.

Objek dalam praktik penelitian *encoding-decoding* adalah makna dan pesan dalam segala bentuk komunikasi atau bahasa, melalui operasi kode dalam rantai sintagmatik sebuah diskursus. Aparatus, relasi dan praktik produksi, kemudian menghasilkan momen tertentu (momen 'produksi/sirkulasi') dalam bentuk sarana simbolik lewat 'bahasa'. Proses sirkulasi 'produk' itu memerlukan materi instrumen, 'maknanya', seperti relasi (produksi) sosialnya, yaitu organisasi dan kombinasi praktik di dalam aparatus media (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 166). Hall menegaskan bahwa realita eksis di luar bahasa, tetapi dimediasikan oleh dan melalui

bahasa: apa yang dapat kita ketahui dan katakan harus diproduksi dalam dan melalui diskursus. 'Pengetahuan' diskursif (*discursive 'knowledge'*) bukan produk dari representasi transparan sebuah 'realita' dalam bahasa, melainkan artikulasi bahasa dalam relasi dan kondisi yang nyata (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 166).

Sebelum pesan dari teks media memiliki dampak, memuaskan 'kebutuhan' atau dipergunakan oleh orang, pesan harus diperlakukan sebagai diskursus yang bermakna (*meaningful discourse*) dan dimaknai (*be meaningfully decoded*). Setelah itu, sebuah pesan baru dapat 'memiliki dampak', mempengaruhi, menghibur, menginstruksikan atau memersuasi, dalam persepsi yang kompleks, kognitif, emosional, ideologis, atau dalam tingkat perilaku/behavioral. Dalam sebuah momen tertentu (*'determinate' moment*), struktur menggunakan kode dan menghasilkan 'pesan'; di dalam momen lain, 'pesan', lewat pemaknaannya (*decodings*), muncul di dalam struktur praktik sosial (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 168).

Model analisis *encoding-decoding* Hall melihat proses sirkulasi makna televisual dalam tiga momen yang berbeda (Storey, 1996: 10). Yang pertama, pekerja media memasukkan peristiwa sosial yang masih mentah (*'raw' social event*) ke dalam diskursus televisual. Ini adalah momen produksi media. Di sini peristiwa sosial (*'social event'*) itu dikonstruksikan lewat makna dan ide, pengetahuan yang digunakan dalam rutinitas produksi, ideologi pekerja media, pengetahuan institusional (*institutional knowledge*), definisi dan asumsi, asumsi tentang audiens, dan sebagainya yang terlibat

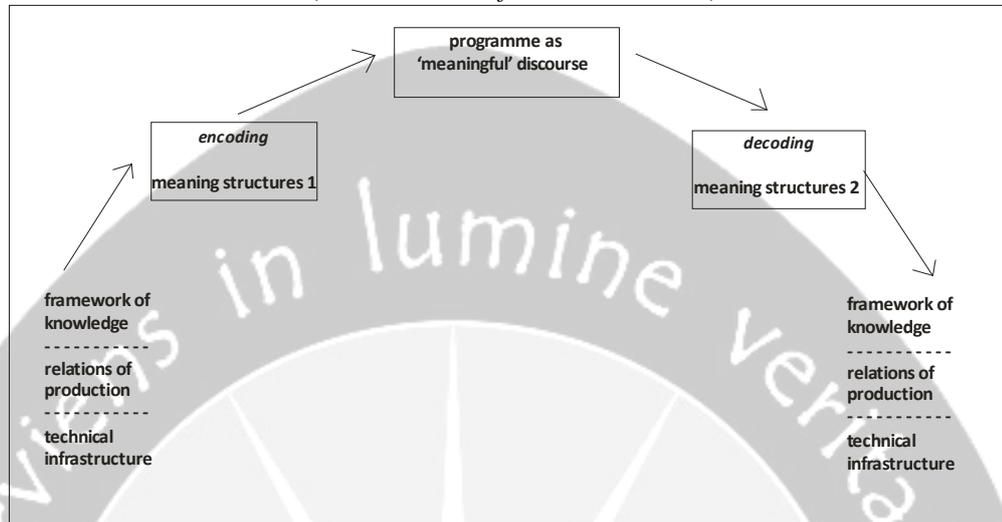
dalam struktur produksi ini (Storey, 1996: 10). Semuanya ini (topik, agenda, peristiwa, gambaran audiens, definisi situasi, dan sebagainya) digambarkan tidak dalam sistem yang tertutup, melainkan disesuaikan dengan konteks sosio-kultural dan struktur politik yang lebih luas.

Pada momen yang kedua, makna dan pesan ada dalam diskursus yang terbuka untuk dimaknai dengan berbagai cara (polisemi). Realita akan tercipta di luar teks media, tetapi dimediasikan oleh dan melalui bahasa. Tidak ada diskursus yang dapat dimengerti tanpa operasi dari kode (Storey 1996: 10).

Yang ketiga adalah momen *decoding* audiens. Audiens tidak dihadapkan pada peristiwa sosial yang mentah, melainkan translasi diskursif dari sebuah peristiwa. Jika peristiwa itu bermakna bagi audiens, diskursusnya akan dibaca dan dimaknai oleh audiens. Jika tidak ada makna yang diambil, tidak ada ‘konsumsi’ yang terjadi (Storey, 1996: 11). Jika makna tidak diartikulasikan dalam praktik, ia tidak memiliki pengaruh. Jika audiens bertindak berdasarkan *decoding*-nya, tindakan itu menjadi praktik sosial—sebuah peristiwa sosial mentah yang dapat disandikan (*to be encoded*) dalam diskursus yang lain.

If no meaning is taken, there can be no ‘consumption’. If the meaning is not articulated in practice, it has no effect. The value of this approach is that while each of the moments, in articulation, is necessary to the circuit as a whole, no one moment can fully guarantee in the next moment with which it is articulated (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 167).

Struktur Praktik Sosial  
(*The Structure of Social Practices*)



Sumber: Storey, 1996: 10

Ketiga momen tersebut (*encoding*, *'meaningful' discourse*, *decoding*) adalah sirkulasi diskursus. Produksi menjadi reproduksi untuk menjadi produksi kembali. Makna dan pesan tidak dengan sederhana ditransmisikan, melainkan selalu diproduksi; pertama oleh *encoder* yang menyandikan 'material mentah' (*raw material*) dalam kehidupan sehari-hari lewat teks; kedua oleh audiens (*decoder*) dalam relasinya dengan diskursus lain.

Konsumsi atau resepsi terhadap pesan merupakan juga momen dari proses produksi dalam konteks yang lebih luas. Tahap ini lebih dominan karena ini adalah 'titik berangkat untuk realisasi' pesan (*'point of departure for the realization' of the message*). Produksi dan resepsi dalam sebuah pesan televisual (atau pesan dalam film) tidak identik, tetapi berelasi: keduanya

adalah momen yang berbeda dalam sebuah bentukan oleh relasi sosial proses komunikasi secara keseluruhan (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 166).

Perdebatan dalam hal ini adalah tentang ‘kapasitas subjektif’ (*subjective capacity*); diskursus televisual adalah fakta objektif, tetapi dalam level interpretasi, terdapat persoalan individual dan privat.

By the word *reading*, we mean not only the capacity to identify and decode a certain number of signs, but also the subjective capacity to put them into a creative relation between themselves and with other signs: a capacity which is, by itself, the condition for a complete awareness of one’s total environment (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 173).

Kode dari *encoding* dan *decoding* bisa jadi tidak secara sempurna simetris. Tingkat kesimetrisannya—yaitu derajat pemahaman (*understanding*) dan kesalahpahaman (*misunderstanding*) dalam pertukaran komunikatif (*communicative exchange*)—tergantung pada derajat kesimetrisan/ ketidaksimetrisan (kesamaan relasi/*relations of equivalence*) yang dibangun antara posisi ‘personifikasi’, *encoder*-produser (*source*) dan *decoder*-penerima/penonton (*receiver*) (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 169). Dalam tulisannya, Hall juga menyebutkan bahwa apa yang disebut ‘distorsi’ atau ‘kesalahpahaman’ muncul dari kurangnya kesamaan paham (*lack of equivalence*) di antara dua sisi pertukaran komunikasi.

Pembuat teks media bisa jadi mengharapkan *decoding* cocok dengan *encoding*, tetapi mereka tidak dapat menjamin hal ini. Stuart Hall, menyitir karya sosiolog Frank Parkin, menyarankan tiga posisi hipotetikal untuk melihat konstruksi *decoding* dari teks:

1. Posisi dominan-hegemonik (*the dominant-hegemonic position*)

Ketika penonton mengambil makna konotasi dari film seperti yang sudah disandikan (*encoded*), kita dapat mengatakan penonton beroperasi di dalam kode dominan. Ini adalah tipe ideal “komunikasi transparan sempurna” (“*perfectly transparent communication*”) (Storey, 1996: 12).

Pembacaan dalam posisi dominan bersifat hegemonik karena mereka merepresentasikan definisi situasi dan *event* yang dominan/global. Definisi dominan menghubungkan peristiwa-peristiwa, baik secara implisit maupun eksplisit, ke sebuah pola utama, sebuah sintagmatik besar pandangan tentang dunia (*great syntagmatic views-of-the world*). Mereka mengambil sebuah sudut pandang besar dari sebuah isu, menghubungkannya dengan “kepentingan nasional” atau dengan level geopolitik, bahkan jika mereka menghubungkannya dengan cara yang tidak utuh, memutarbalikkannya, atau membuatnya menjadi membingungkan (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 174).

Definisi sudut pandang hegemonik adalah (a) pemaknaannya terhadap pesan dan keseluruhan bagian dalam masyarakat atau kebudayaan ada di dalam tataran mental; dan (b) terdapat legitimasi di dalamnya terhadap sesuatu yang ‘natural’, ‘tidak terhindarkan’, ‘apa adanya’ tentang tatanan sosial (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 174).

## 2. Posisi negosiasi (*the negotiated code or position*)

Posisi ini adalah percampuran dari elemen adaptif dan oposisional: posisi ini mengakui legitimasi definisi hegemonik untuk membuat signifikasi yang luas (abstrak), tetapi dalam tingkat yang lebih sempit—level

situasional—ia membuat aturannya sendiri, beroperasi dalam beberapa perkecualian. Oleh karenanya, versi negosiasi dari ideologi dominan ini mengandung kontradiksi, walaupun hanya dalam beberapa situasi khusus. Dugaannya, sebagian besar ‘kesalahpahaman’ (*misunderstanding*) timbul dari kontradiksi antara *hegemonic-dominant encodings* dan *negotiated-corporate decodings* (Hall, 1973; dalam Kellner, 2001: 175).

### 3. Posisi oposisional (*the oppositional code*)

Posisi ini terjadi ketika penonton mengenali kode yang disampaikan oleh teks, tetapi memilih memaknainya dengan cara lain (*alternative frame of reference*) (Storey, 1996: 13).

Pemahaman tentang *encoding-decoding* yang sudah dipaparkan di atas akan penulis gunakan untuk melihat posisi penonton muslim dalam membaca teks film *Perempuan Berkalung Sorban*, khususnya dalam persoalan gender dan seksualitas.

#### 1.5.4. Ideologi dalam Studi Berbasis Audiens

Di dalam model analisis *encoding-decoding* yang dikembangkan oleh Stuart Hall, ideologi menjadi komponen penting karena hal ini melatarbelakangi derajat kesimetrisan/ketidaksimetrisan posisi *encoder* dan *decoder*. David Morley, dalam bukunya *The Nationwide Television Studies*, menyebut hal ini sebagai problem ideologis (Morley, 1999: 270).

Tidak ada definisi tunggal mengenai ideologi karena terminologi “ideologi” dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tidak semua definisi tersebut cocok satu sama lain. Penelitian ini akan melihat fungsi ideologi sebagai sebuah sistem gagasan yang diartikulasikan oleh kelompok tertentu dan sebagai alat kelompok dominan untuk memperjuangkan kepentingannya lewat kelompok subordinat.

Ideologi sebagai sebuah sistem gagasan dalam kelompok tertentu melihat kesamaan atau kemiripan sistem pengetahuan seseorang dengan orang yang lain karena mereka terikat dalam sebuah kelompok bersama, misalnya organisasi berbasis agama, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Kemiripan ideologi di antara orang-orang dalam sebuah kelompok ini diperoleh dari apa yang disebut para sosiolog sebagai proses sosialisasi, proses di mana secara bertahap individu mempelajari norma-norma budaya, atau cara-cara bertingkah laku masyarakat di mana mereka dibesarkan (Strinati, 2003: 176). Dari sudut pandang tersebut, orang-orang hanya memiliki sedikit pengendalian atas proses ini dan tak mungkin menghindarinya. Pada level individual, seseorang dibentuk menurut ajaran ideologis di mana mereka tinggal.

The formation of humans by every ideology, conservative or revolutionary, oppressive or emancipator, according to whatever criteria, involves a process simultaneously of subjection and qualification... New members become qualified to take up and perform (a particular part of) the repertoire of roles given in the society (Hattery, 2001: 19).

Althusser menyatakan bahwa ideologi menuntut individu menjadi subjek (Strinati, 2003: 175). Subjek adalah ciri pembeda dari semua ideologi

dan seluruh ideologi bekerja dengan mengambil individu dan menempatkannya sebagai subjek dalam kerangka ideologi tertentu. Therborn (1980, dalam Hattery, 2003: 20) menjelaskan bagaimana individu diubah menjadi seorang subjek, yaitu dengan menjelaskan kepada mereka, menghubungkan mereka dengan, dan membuat mereka mengenal tentang:

1. Apa yang eksis, yang tampak wajar, dan yang tidak eksis.

Ini adalah tentang siapa kita, apa itu dunia, alam, masyarakat, seperti apa perempuan dan laki-laki. Dengan mengenal ini kita membutuhkan rasa identitas, menjadi sadar apa yang nyata dan benar

2. Apa yang baik, benar, pantas, indah, atraktif, menyenangkan, dan kebalikannya. Dengan ini hasrat kita distrukturkan dan dinormalisasi.
3. Apa yang mungkin dan tidak mungkin; kesadaran kita akan ketidaktetapan kita di dunia dan konsekuensi perubahan dengan ini dipolakan; harapan, ambisi, dan rasa takut kita dibentuk.

Ideologi menuntut adanya tindakan di pihak orang-orang yang menjalani relasi imajiner yang dijabarkan untuk mereka. Salah satu poin penting sudut pandang Althusser tentang ideologi adalah bahwa ideologi bukan hanya sistem gagasan, melainkan persoalan praktik dalam kehidupan sehari-hari (Storey, 2009:5). Beberapa ritual dan kebiasaan yang kita lakukan mengikat kita dalam sebuah tatanan sosial: tatanan sosial yang ditandai kesenjangan dalam hal kekayaan, status, dan kekuasaan.

Althusser mengidentifikasi lembaga-lembaga negara tertentu yang menjalankan proses reproduksi gagasan, yang tugasnya pada dasarnya bersifat ideologis. Lembaga-lembaga tersebut oleh Althusser disebut aparat negara ideologis yang difungsikan secara besar-besaran dan dominan oleh ideologi<sup>11</sup>. Lembaga-lembaga ideologis ini meliputi agama, keluarga, pendidikan, serikat dagang, media massa, dan budaya populer (Strinati, 2003: 172). Sebuah agama akan menempatkan seluruh individu yang berperan serta dalam berbagai praktik materiil sebagai subjek atau penganut, yang tunduk pada satu objek, yaitu Tuhan. Ideologi demokrasi politik akan menempatkan individu sebagai subjek dalam pengertian mereka menjadi warga negara yang tunduk pada kedaulatan parlemen. Ideologi patriarkal akan menuntut individu sebagai laki-laki yang lebih kuat atau perempuan kurang berdaya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan praktik-praktik yang diatur oleh ritual di mana praktik-praktik tersebut direkatkan, di dalam eksistensi materiil suatu aparatus/perangkat ideologis (Strinati, 2003: 175).

Relasi-relasi yang melibatkan ideologi ini kerap tidak seimbang. Bahkan, ideologi adalah alat untuk melanggengkan kekuasaan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat. Paparan Gramsci mengenai hegemoni akan menjelaskan hal ini. Gramsci memandang hegemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis di mana kelompok-kelompok yang dominan di dalam masyarakat, termasuk pada dasarnya (meskipun bukan secara

---

<sup>11</sup> Althusser membedakan lembaga negara ideologis dengan lembaga represif. Lembaga negara ideologis bekerja dengan cara-cara tanpa pemaksaan, sementara lembaga represif menggunakan cara-cara pemaksaan/koersi. Contoh lembaga represif adalah kepolisian, militer, penjara, persidangan, dan sebagainya.

eksklusif) kelas penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” kelompok-kelompok subordinat melalui penciptaan konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan maupun yang didominasi (Strinati, 2003: 188-189).

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menerangkan berbagai macam cara kontrol sosial bagi kelompok sosial yang dominan. Dia membedakan antara *pengendalian koersif* yang diwujudkan melalui kekuatan langsung atau ancaman kekuatan, dengan pengendalian konsensual yang muncul ketika individu-individu “secara sengaja” atau “secara sukarela” mengasimilasikan pandangan dunia atau hegemoni kelompok dominan tersebut; sebuah asimilasi yang memungkinkan kelompok itu untuk bersikap hegemonik (Ransome, 1992: 150, dalam Strinati, 2003: 189).

Dari sudut pandang hegemoni ini, budaya yang tersebar merata di dalam masyarakat pada waktu tertentu dapat diinterpretasikan sebagai suatu hasil atau perwujudan hegemoni, perwujudan dari penerimaan “konsensual” oleh kelompok-kelompok gagasan subordinat, nilai-nilai, dan kepemimpinan kelompok dominan tersebut (Strinati, 2003: 189).

Beberapa konsep tentang ideologi tersebut digunakan untuk melihat paling tidak bahwa (1) setiap orang memiliki konstruksi ideologi yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana latar belakangnya membentuk ideologi tersebut, (2) ideologi akan berpengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku setiap orang, (3) ada relasi yang tidak seimbang ketika ideologi digunakan untuk melanggengkan kepentingan kelompok dominan, (4) ideologi bekerja dalam ketidaksadaran; kelompok dominan tidak merasa dirinya mengeksploitasi atau mengopresi kelompok subordinat dan bahwa kelompok subordinat tidak merasa tereksplorasi.

Ideologi seseorang akan berpengaruh pada praktik sosialnya, termasuk bagaimana mereka memaknai sebuah teks yang juga tidak lepas dari konstruksi ideologi pembuatnya. Dasar-dasar pemikiran tentang ideologi ini akan digunakan untuk melihat bagaimana ideologi informan dalam penelitian berpengaruh pada posisi pembacaannya terhadap kode-kode dominan dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*.

#### **1.5.5. Ketimpangan Gender dan Feminisme**

Gender adalah suatu maskulinitas dan feminitas yang dibentuk secara sosial, kultural, dan psikologis, yakni atribut yang didapat melalui proses menjadi laki-laki atau perempuan dalam sebuah masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu (Jackson dan Jones, 2009: 228). Anggapan tentang gender menghasilkan relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Feminisme kemudian hadir untuk mengkritik simbol, ideologi, dan kultur yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.

Secara substansial, komitmen dasar kaum feminis adalah terwujudnya kesetaraan gender dan dihapuskannya ketidakadilan terhadap perempuan (Kadariusman, 2005: 27). Dalam perkembangannya, ada beberapa aliran feminisme yang dibedakan berdasarkan bagaimana masing-masing menafsirkan akar ketidakadilan terhadap perempuan dan arah perjuangannya. Karena film *Perempuan Berkalung Sorban* menggambarkan beberapa bentuk ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan serta perjuangan perempuan untuk melawan diskriminasi itu, penulis menggunakan feminisme

sebagai salah satu landasan berpikir. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat ketimpangan gender dari kaca mata feminisme sosialis dan feminisme radikal.

Feminisme sosialis menggunakan sudut pandang teori epistemologi yang mendalilkan bahwa semua pengetahuan merepresentasikan kepentingan dan nilai-nilai kelompok sosial tertentu dengan mendeskripsikan variasi historis dalam praktik dan kategori-kategori di mana nilai dipahami (Kadariusman, 2005: 33). Berdasarkan teori epistemologi tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki mempunyai kepentingan tertentu dalam mengonstruksikan berbagai tatanan institusional untuk melanggengkan dominasi tersebut.

Dalam proses sosiologis, bentuk-bentuk hubungan yang berbeda, termasuk pembedaan berdasarkan jenis kelamin, dipahami sebagai hubungan dialektis antarkepentingan berbagai kelompok sosial yang berbeda. Membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki dapat dilakukan dengan memformat hubungan dialektis yang setara antara laki-laki dan perempuan (Kadariusman, 2005: 33). Semakin besar perlawanan yang dilakukan perempuan terhadap kelas dominan, diharapkan semakin besar peluang untuk meruntuhkan sistem patriarki.

Sementara feminisme sosialis melihat peran kelompok sosial tertentu untuk melanggengkan dominasi, feminisme radikal, menurut Ritzer-Goodman, melihat penindasan gender sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki memiliki

kepentingan mendasar dan konkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, dan menindas perempuan untuk melaksanakan dominasi (Ritzer dan Goodman, 2009: 502). Yang dimaksud dominasi oleh para teoretisi penindasan adalah segala macam hubungan di mana satu pihak (individu atau kolektif), pihak dominan, berhasil menjadikan pihak lain (individu atau kolektif), yaitu pihak subordinat, sebagai instrumen keinginannya, dan menolak mengakui kemandirian pihak subordinat. Atau sebaliknya, dari sudut pandang subordinat, ini adalah hubungan ketika signifikansi yang melekat pada pihak subordinat hanya dipandang sebagai instrumen kepentingan pihak dominan (Lengermann dan Niebrugge, 1995 dalam Ritzer dan Goodman, 2009: 502).

Feminisme radikal melihat bahwa di dalam setiap institusi dan di dalam struktur masyarakat terdapat sistem penindasan di mana orang tertentu mendominasi orang lain. Struktur paling mendasar terdapat dalam sistem patriarki, penindasan laki-laki atas perempuan. Struktur dominasi dan ketertundukan itu tak hanya terdapat dalam sistem patriarki pertama secara historis, tetapi juga berlanjut sebagai sistem ketimpangan yang berkembang menjadi model dominasi kemasyarakatan mendasar (Ritzer dan Goodman, 2009: 506).

Sejumlah penganut feminisme radikal menyatakan terdapat dua sistem kelas sosial. Pertama, sistem kelas ekonomi yang didasarkan pada hubungan produksi. Kedua, sistem kelas seks yang didasarkan pada hubungan reproduksi. Konsep patriarki merujuk pada sistem kelas yang kedua, yaitu

pada kekuasaan kaum laki-laki atas perempuan, yang didasarkan pada pemilikan laki-laki atas kapasitas reproduktif perempuan. Bagi feminis radikal, patriarki adalah sumber ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privilege* ekonomi (Narwoko-Suyanto, 2006: 349).

Relasi-relasi yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki tersebut berakibat pada lahirnya ketidakadilan gender<sup>12</sup>. Ketidakadilan gender terhadap perempuan termanifestasi dalam beberapa hal<sup>13</sup>, yaitu:

1) marginalisasi perempuan

Proses marginalisasi atau peminggiran perempuan merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan atau pemiskinan terhadap perempuan. Contoh marginalisasi perempuan misalnya anggapan bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 16).

2) subordinasi

Proses subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin

---

<sup>12</sup> Ketidakadilan gender sebenarnya tidak hanya bisa terjadi pada perempuan, melainkan juga laki-laki. Namun, perempuan memang lebih kerap mengalami perlakuan yang tidak adil karena anggapan gender. Karena penelitian ini terkait dengan bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan, penulis tidak memasukkan contoh-contoh diskriminasi yang dialami laki-laki.

<sup>13</sup> Manifestasi ketidakadilan gender yang ditulis di sini merupakan rangkuman dan simpulan dari materi yang terdapat dalam "Modul Konsep dan Teori Gender: Diklat Teknis Penyadaran Gender di Era Desentralisasi" (Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007) dan pembahasan tentang feminisme radikal dalam *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern* (Ritzer dan Goodman, 2009: 507).

lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaga-tenaganya. Pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki sudah ada sejak dulu, misalnya dalam tradisi, tafsir keagamaan, maupun aturan birokrasi yang meletakkan perempuan pada tatanan subordinat (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 17).

Contoh subordinasi perempuan antara lain:

- banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti guru taman kanak-kanak, sekretaris, atau perawat, yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan yang dianggap pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen, dokter, atau tentara. Hal ini berpengaruh pada perbedaan gaji yang diperoleh perempuan (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 17).
- perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan yang lebih memerlukan keterampilan dan kekuatan, yang biasanya dianggap lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 17).
- Apabila seorang istri hendak menempuh pendidikan atau bepergian, ia harus mendapat izin dari suami, tetapi suami bisa mengambil

keputusan secara independen tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18).

### 3) stereotipe

Stereotipe gender adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18). Contoh kerugian perempuan akibat stereotipe terhadapnya adalah:

- Tugas dan peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan (tugas domestik) (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18).
- Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis, maupun birokrasi (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18).
- Label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18).
- Keterlibatan perempuan di ruang publik dalam beberapa jenis pekerjaan hanyalah merupakan “perpanjangan” dari peran domestiknya (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18).

- Perbedaan standar penilaian, misalnya kemarahan laki-laki dianggap sikap yang tegas sementara kemarahan perempuan dianggap sebagai bentuk sisi emosional dan ketidakmampuannya untuk menahan diri (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 18).

#### 4) kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang. Contoh-contoh kekerasan, baik mental maupun psikologis, adalah istri tidak diperbolehkan bekerja oleh suami, istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah, suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat, suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 19), perkosaan, prostitusi yang dipaksakan, penyelewengan terhadap pasangan, rajam untuk pelaku zinah, hukuman mati bagi homoseksual, pembunuhan terhadap bayi perempuan, pelecehan terhadap janda, praktik khitan perempuan, dan sebagainya (Barnett dan LaViolette, 1993; Barry, 1979, 1997; Bart dan Moran, 1993; Bergen, 1996; Buchwald, Fletcher, dan Roth, 1993; Hammer, 2002; Kempadoo, 2001; Mardorossian, 2002; Owen, 1996; Russel, 1998; Sanday, 1996; Scully, 1990; Stiglmayer, 1994 dalam Ritzer dan Goodman, 2009: 507).

#### 5) beban kerja ganda

Beban kerja ganda yang dialami perempuan terjadi ketika perempuan memiliki tanggung jawab dalam wilayah domestik (rumah tangga) dan

wilayah publik (kegiatan ekonomi) yang sekaligus dilakukan secara bersamaan (Departemen Dalam Negeri dan Administrasi Negara, 2007: 20).

#### 1.5.6. Seksualitas dalam Konstruksi Sosial

Menurut Catherine Mac Kinnon (dalam Jackson dan Jackie, 2009: 242), seksualitas adalah sebuah proses yang menciptakan, mengatur, mengungkapkan, dan mengarahkan hasrat, menciptakan makhluk sosial yang kita kenal sebagai laki-laki dan perempuan. Pembagian gender, salah satunya, diciptakan berdasarkan persyaratan sosial heteroseksualitas, yang melembagakan dominasi seksual laki-laki dan ketertundukan seksual perempuan. *Lebih jauh, seksualitas memerlukan gender: "femininitas" sama dengan ketertarikan pada laki-laki; penjajahan seksual atas perempuan menegaskan maskulinitas* (Jackson dan Jackie, 2009: 239).

Seks, dilihat dari sudut pandang konstruksi sosial, merupakan pengalaman sosial yang mendasari relasi interpersonal, norma sosial, dan nilai sosial. Seks adalah tindakan sosial yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain (Steele, 2005: 2).

A social constructionist view of sexuality views it as neither genetically/naturally determined nor as a purely self-conscious moral choice. Social institutions and practices not only direct and restrict one's sexual behavior, but also give this behavior its content and meaning. "Each society seems to have a limited range of potential storylines for its sexual scripts," as Stephen Eipstein has noted (1987: 24). Theorizing about sexuality involves studying the social construction of a constellation of possible sexual behaviors at a particular place and time (Kivisto dan Hartung, 2006: 275).

Ini menunjukkan bahwa seksualitas yang selama ini oleh kebanyakan orang dianggap natural, sebenarnya diproduksi, direproduksi, dan dikontestasikan secara sosial. Pemahaman tentang seks berbeda-beda melampaui batas waktu dan geografis. Seks—meliputi aktivitas seksual, hasrat, serta pemahaman mengenai seksualitas—tergantung pada kapan dan di mana seseorang dilahirkan, jenis kelaminnya, umur, etnisitas kelas sosial, status perkawinan, teman pergaulan, keluarga, pekerjaan, status ekonomi, atau apa agamanya (Steele, 2005: 2).

Konstruksi sosial melihat bahwa pemahaman-pemahaman tentang seksualitas tidak pernah muncul secara alamiah, melainkan selalu dibentuk oleh sebuah kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu, pembentukan suatu tipe pengetahuan tentang seks harus dianalisis dalam konteks kekuasaan. Kekuasaan dipahami pertama-tama sebagai hubungan kekuatan yang imanen; kedua kekuasaan bermain dengan perjuangan untuk mengubah, memperkokoh, atau memutarbalikkannya; ketiga, berbagai bentuk hubungan kekuatan yang saling mendukung dapat membentuk rangkaian sistem, atau sebaliknya, kesenjangan atau kontradiksi; terakhir, strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum, dan hegemoni sosial (Foucault, 2008: 121). Berikut beberapa ciri pokok seksualitas dalam konteks kekuasaan:

- Hubungan negatif

Di antara kekuasaan dan seks, representasi hanya terjadi dalam bentuk negatif, penyingkiran, pengabaian, penolakan, penyelubungan, atau penyamaran (Foucault, 2008: 110).

- Instansi aturan

Kekuasaan hanyalah apa yang menentukan hukum seks. Artinya, pertama seks ditempatkan oleh kekuasaan di bawah sistem biner: halal-haram, boleh-terlarang. Bentuk murni dari kekuasaan dijumpai dalam fungsi pembuat undang-undang dan caranya bertindak terhadap seks adalah secara yuridis-kewacanaan (Foucault, 2008: 111).

- Siklus larangan

Mengenai seks, kekuasaan hanya memfungsikan hukum larangan (kamu tidak boleh dekat-dekat, kamu tidak boleh menyentuh, kamu tidak boleh memanfaatkan, kamu tidak boleh merasa nikmat, kamu tidak boleh bicara, dan lain-lain). Tujuannya: agar seks menyangkal dirinya sendiri (Foucault, 2008: 110).

- Logika sensor

Larangan ini dianggap memiliki tiga bentuk: menegaskan bahwa “itu” (hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas) tidak boleh, menghalangi “itu” untuk dikatakan, dan menyangkal bahwa “itu” ada (Foucault, 2008: 111-112).

- Kesatuan perangkat

Kekuasaan atas seks diterapkan secara merata di segala tataran. Kekuasaan bertindak secara seragam dan massal. Kekuasaan

diproduksi oleh hukum, larangan, dan sensor dari seluruh perangkat masyarakat. Dari berbagai instansi, dominasi sosial, sampai berbagai struktur pembentuk subjek sendiri dapat dijumpai suatu bentuk kekuasaan yang hanya berbeda dalam skala. Bentuk itu adalah hukum—kekuasaan diskematiskan dalam bentuk yuridis dan dampaknya dirumuskan sebagai kepatuhan. Homogenitas bentuk kekuasaan di segala instansi itu sama dengan bentuk umum kepatuhan. Kekuasaan pembentuk undang-undang di satu pihak dan subjek patuh di pihak lain (Foucault, 2008: 112-113).

Dari argumen-argumen di atas, dapat dilihat bahwa seksualitas selalu berada dalam sistem kekuasaan tertentu. Di dalam kekuasaan, selalu ada pihak yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pihak yang lain sehingga hubungan menjadi timpang. Kekuasaan tersebut masuk ke dalam dan dilanggengkan kembali dalam keluarga, kelompok terbatas, dan lembaga yang dampaknya luas dan menyebar ke seluruh masyarakat. Namun, di mana pun ada kekuasaan, ada perlawanan terhadap kekuasaan tersebut (Foucault, 2008: 123).

Di dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*, kekuasaan yang amat dominan dalam menentukan seksualitas dan relasi-relasi berkaitan dengan itu adalah agama Islam. Agama Islam dijadikan dalil dan selalu dirujuk dalam memahami relasi-relasi seksual. Dalam film ini, interpretasi sebagian besar tokoh Islam seperti pengurus pondok pesantren mengakibatkan seolah-olah

perempuan diposisikan sebagai nomor dua, setelah laki-laki, dalam relasi seksual. Oleh karena itu, perlawanan muncul, terutama dari tokoh Annisa.

### **1.5.7. Gender, Seksualitas, dan Feminisme dalam Konteks Keislaman**

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan memiliki implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Persepsi yang seolah-olah ada di alam bawah sadar seseorang jika mempunyai atribut biologis (seperti penis pada laki-laki dan vagina pada perempuan) adalah atribut gender. Selanjutnya, atribut gender itu akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.

Agama sebagai sumber sistem sosial berperan besar dalam mengonstruksikan bagaimana seseorang memaknai dunia termasuk relasi antara perempuan dan laki-laki di dalamnya. Seperti dikatakan Geertz, agama dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk menetapkan seksualitas dan status orang dewasa dan rasionalisasi hak-hak sosial yang istimewa dalam masyarakat (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 62).

Dalam artikelnya yang berjudul “Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam”, Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan bahwa dalam budaya patriarki, agama berfungsi untuk melegitimasi kenormalan seksualitas dan status laki-laki. Konsekuensinya, seksualitas dan status perempuan tidak akan pernah menempati “kenormalan” laki-laki (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 62).

Dalam penafsiran beberapa agama seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan beberapa agama lainnya, pandangan misoginis terhadap perempuan muncul. Sikap misoginis, menurut Fatima Mernissi, adalah kegusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang disamakan dengan perempuan (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 62). Secara umum perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang bermasalah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Pandangan ini kemudian mendapat legitimasi dari beberapa agama besar dunia. Penggambaran perempuan yang bersifat misoginis selalu ada dalam berbagai teks. Di dalam agama Islam, Dzuhayatin mengungkapkan bahwa karya-karya Islam klasik maupun kontemporer, perempuan lebih banyak digambarkan sebagai sumber kejahatan, birahi, dan dekadensi moral yang akan menjerumuskan laki-laki ke neraka (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 63).

Secara historis, sikap-sikap misoginis terhadap perempuan telah ada sejak Islam muncul sebagai gerakan reformasi budaya. Islam sempat ditolak oleh masyarakat Arab karena dianggap mencoba menghapuskan simbol-simbol superioritas kekuasaan laki-laki. Gagasan tentang keesaan Allah meruntuhkan kewibawaan “laki-laki dewasa” sebagai kepala suku atas kaumnya, tuan atas budaknya, ayah atas anak-anaknya, saudara laki-laki atas saudara perempuannya, dan suami atas istrinya (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 63).

Kecenderungan superioritas laki-laki kembali menguat sepeninggal Nabi Muhammad. Hal ini tampak dari interpretasi para sahabat (Nabi)

terhadap beberapa ayat Alquran tentang hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki tetap ditempatkan sebagai penguasa, pemimpin, dan pengontrol perempuan. Perubahan ini diawali dengan pergeseran struktur kekuasaan yang demokratis menjadi monarki absolut. Kehidupan monarki yang mengadaptasi bentuk dari Bizantium dan Persia ini semakin menjauhkan masyarakat muslim dari modernitas yang pernah dicoba untuk dicapai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sistem patriarki kembali muncul untuk mengembalikan status quo laki-laki (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 63-64).

Selanjutnya, ayat-ayat dalam Alquran membutuhkan penafsiran untuk dapat dijadikan pegangan oleh umat muslim. Kaum teolog dihadapkan pada keharusan untuk melakukan interpretasi terhadap teks Alquran dalam konteks budaya setempat.

Dalam proses kontekstualisasi ini, inkulturasi tidak terelakkan. Meskipun demikian, kendali politis tidak selalu memberi peluang bagi para teolog progresif untuk menyuarakan keadilan yang hakiki. Ini terbukti dari beberapa pemikir yang harus menghadapi kematian dan penjara bila mereka tidak menyediakan alat justifikasi bagi kepentingan raja: kepentingan laki-laki (Dzuhayatin, 1997: 65).

Interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran akan selalu mengandung “prior teks”, yaitu persepsi, keadaan, dan latar belakang orang yang menginterpretasikan. Meskipun ayat yang dirujuk sama, hasilnya dapat berbeda. Setiap penafsiran tidak akan dapat dipisahkan dari semesta intelektual penafsir sesuai dengan pandangan dunia yang dianutnya. Karena hampir semua teolog adalah laki-laki, yang terakomodasikan dalam kitab-kitab tafsir dan fikih (hukum Islam) adalah kepentingan penguasa:

kepentingan laki-laki. Tidak adanya suara perempuan dalam penafsiran Alquran dan fikih bahkan seringkali dianggap sebagai “ketiadaan suara perempuan dalam ayat-ayat Alquran” (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 65). Hal ini cukup menjelaskan mengapa perspektif perempuan tidak pernah hadir dalam wacana keislaman. Dulu, ketika akses perempuan masih terbatas, dominasi kultur patriarki dianggap sebagai realitas yang alamiah sehingga kaum perempuan tidak menyadari ketergantungan dan ketersudutannya.

Secara umum, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang melebur ke dalam citra laki-laki, separo dari laki-laki, sebagai objek dan makhluk domestik. Kitab-kitab fikih mengaburkan posisi sentral perempuan sebagai “*keibuan*” yang penuh kewibawaan dan kebijaksanaan menjadi posisi “*keistrian*” yang submisif dan tergantung. Kondisi ini diperparah dengan munculnya hadis-hadis palsu seperti “tidak akan masuk surga seorang istri kecuali atas ridha suaminya” (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 66).

Tentang peran perempuan di ruang publik, kitab fikih bahkan sama sekali tidak punya gambaran tentang perempuan yang bekerja di luar rumah. Hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan karena pada masa itu banyak perempuan dari kalangan miskin yang harus bekerja. Dalam pandangan kekinian, fikih tidak saja mengandung bias gender, melainkan juga bias kelas dan lebih berorientasi pada kelompok elite masyarakat (Dzuhayatin, dalam Abdullah, 1997: 67).

Selain itu, dalam tradisi periwayatan hadis, ditemukan teks hadis Nabi Muhammad yang menjadi sorotan kaum feminis. Hadis-hadis itu antara lain

hadis yang menyatakan perempuan merupakan sumber bencana, tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin, dan perempuan dapat membatalkan salat seseorang apabila ia lewat di depannya. Hadis-hadis inilah yang dalam khazanah kritik hadis gender disebut hadis-hadis misoginis (Kadariusman, 2005: 5).

Gerakan-gerakan feminis kemudian muncul dan bertujuan mengikis ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan dalam struktur sosial serta memperjuangkan kesetaraan gender. Feminisme bersentuhan dengan masyarakat Islam pada akhir abad ke-19. Karena berasal dari dunia barat, respons terhadap feminisme di kalangan Islam pun beragam. Sejak awal, perdebatan tentang hal ini berfokus pada kesesuaian ide emansipasi perempuan dengan prinsip-prinsip Islam (Mojab, 2001: 127). Secara garis besar, respons itu dapat dikelompokkan menjadi dua.

Kelompok pertama berpendapat bahwa hubungan gender dalam masyarakat Islam telah sesuai dengan “ajaran Islam” yang telah mendudukan perempuan pada posisi yang terhormat, tidak lebih rendah daripada laki-laki. Kelompok ini beranggapan bahwa feminisme tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat muslim yang menghendaki “status quo” (Sukri, 2002: 195). Bagi mereka, pengadopsian feminisme bagi masyarakat muslim justru merupakan suatu kemunduran dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kelompok yang kedua memandang bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial masyarakat muslim, perempuan masih diperlakukan tidak adil; perempuan belum mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki

dalam hubungan gender. Kelompok ini berusaha memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender dalam struktur sosial sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam, yakni keadilan (Sukri, 2002: 196). Kelompok kedua ini disebut feminis muslim, sedangkan gerakan dan teori mereka disebut feminisme Islam.

Fereshteh Ahmadi, dalam esainya yang berjudul “Islamic Feminism in Iran: Feminism in A New Islamic Context” (2006), mengutip definisi feminisme Islam dari Margot Badran, yaitu diskursus dan praktik feminisme yang diartikulasikan dalam paradigma Islam. Mereka menitikberatkan perhatiannya pada interpretasi klasik oleh laki-laki yang bersifat patriarkal, seperti yang dikatakan Ahmadi, *“They stress, as Badran explains, that classical, and also much of post-classical, interpretation was based on men’s experiences, male-centered questions, and the overall patriarchal societies in which they lived”* (Ahmadi, dalam *Journal of Feminist Studies in Religion*, 2006: 36).

Para feminis muslim ini berpandangan bahwa ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki tersebut tidak disebabkan oleh ajaran dasar Islam yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dalam struktur sosial, tetapi oleh “bias laki-laki” dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam yang aplikasinya dalam kehidupan masyarakat membentuk tradisi Islam. Kondisi ini dianggap sebagai ajaran agama yang harus diterima dan dipertahankan. Fatima Mernissi menandakan bahwa teks-teks suci telah dimanipulasi demi

melanggengkan kekuasaan laki-laki dan menjadi ciri struktur kekuasaan dalam masyarakat muslim (Kadariusman, 2005: 5).

Feminis melihat asal mula Islam dan menyatakan bahwa perempuan, yang memainkan peranan penting sebagai pencipta teks oral, menjadi tidak terlihat setelah Islam lahir, baik sebagai pencipta atau penginterpretasi teks-teks itu (Mirza, dalam *ISIM Review*, 2008: 30). Literatur kitab suci kemudian diproduksi oleh laki-laki yang memasukkan asumsi dan pengertian mereka yang terbatas tentang relasi gender. Teks-teks legal juga diproduksi dengan cara ini sehingga kecenderungan maskulin menjadi literatur legal pada masa itu (Mirza, dalam *ISIM Review*, 2008: 30). Feminis muslim mencoba membongkar akar ketidakadilan ini dengan melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan. Mereka ingin membangun kembali kerangka berpikir Islam dengan paradigma gender yang benar sehingga perempuan memiliki hak-hak legalnya.

Pemahaman tentang ketimpangan gender dan seksualitas dalam konteks keislaman ini kemudian menjadi dasar identifikasi persoalan-persoalan yang muncul dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*. Isu-isu gender dan seksualitas yang biasanya menjadi problematis dalam Islam antara lain meliputi permasalahan (Jamhari dan Ropi, 2003):

- a) kepemimpinan
- b) partisipasi publik
  - pendidikan, dakwah, dan sosial
  - kegiatan ekonomi

- kegiatan hukum dan keagamaan
  - jabatan politik
- c) hak-hak reproduksi

- memilih pasangan
- hubungan seksual
- menentukan kehamilan
- menceraikan pasangan

Film *Perempuan Berkalung Sorban* tidak merepresentasikan seluruh persoalan di atas, maka dalam analisis penulis hanya akan memerikan kode-kode dominan yang terdapat dalam film tersebut.

## **1.6. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencoba menjelaskan bagaimana orang menangkap makna dari sebuah peristiwa dan belajar melihat sebuah peristiwa dari berbagai perspektif (Neuman, 2000: 144). Penelitian kualitatif berkaitan erat dengan interpretasi. Penulis yang menggunakan jenis penelitian kualitatif harus melihat masalahnya berdasarkan konteks sosial masyarakat di sekitarnya. Beberapa ciri penelitian kualitatif yang dirangkum oleh Usman dan Akbar dalam bukunya, *Metode Penelitian Sosial* (Usman dan Akbar, 2008: 99) adalah:

- sumber data berada dalam situasi yang wajar (*natural setting*)
- laporannya bersifat deskriptif
- mengutamakan proses
- bertujuan mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan informan.
- mementingkan data langsung (tangan pertama)
- menonjolkan rincian yang kontekstual, yaitu menguraikan sesuatu secara rinci dan tidak terkotak-kotak
- mengutamakan perspektif emik (*emic*), yaitu pendapat informan daripada pendapat peneliti sendiri (*etic*).

Penulis memilih jenis penelitian kualitatif untuk meneliti resepsi penonton muslim terhadap persoalan gender dan seksualitas dalam film *Perempuan Berkalung Sorban* karena penulis ingin mengetahui resepsi penonton secara lebih mendalam dengan mengetahui alasan-alasan mengapa mereka berpikir dengan cara mereka masing-masing.

### **1.6.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Handari Nawawi dan Mimi Martini, penelitian yang bersifat deskriptif menyelidiki masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1994: 73). Penelitian deskriptif

menempatkan peneliti sebagai pengamat atas dasar adanya sesuatu yang menarik perhatian.

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis juga dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi informan berpikir, berperasaan, dan bertindak seperti itu (Usman dan Akbar, 2008: 130). Hal ini kemudian direduksi, ditriangulasi, dan disimpulkan (diberi makna oleh peneliti).

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena dan berupaya menariknya ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68). Penelitian deskriptif mencoba mengidentifikasi atau menggambarkan sebuah kondisi, yang dalam hal ini adalah pembacaan penonton muslim terhadap kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas.

### **1.6.3 Proses Pengumpulan Data**

#### **1.6.3.1 Pemilihan Informan**

Penelitian yang berfokus pada audiens ini membutuhkan beberapa orang informan untuk dilihat pola pembacaannya atas kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban*. Film yang kental menggunakan

nuansa Islami dan beberapa penafsiran terkait dengan ajaran agama Islam ini membuat penulis tertarik untuk melihat perbedaan pemaknaan isu gender dan seksualitas dalam film ini dari kacamata penonton muslim. Muslim, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bermakna penganut agama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996: 676). Penulis menggunakan kata “muslim” untuk mewakili para informan yang beragama Islam. Melihat bahwa bahkan dengan latar belakang agama yang sama, penafsiran seseorang tentang ajaran agama Islam berkaitan dengan gender dan seksualitas pun dapat berbeda-beda akan menjadi hal yang menarik.

Penelitian kualitatif pun mengenal teknik sampling yang disebut *non-probability sampling* atau penentuan sampel tidak acak. Ciri-ciri sampel tidak acak adalah (1) tidak setiap populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih, (2) tidak bermaksud merepresentasikan seluruh populasi, (3) dan oleh karena itu hasil atau kesimpulan yang didapat tidak bisa digeneralisasikan (Alston dan Bowles, 2003: 87). Jenis-jenis sampel tidak acak adalah *accidental sampling* (sampel dipilih secara tidak disengaja), *quota sampling* (sampel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kategori tertentu), *purposif sampling* (sampel diambil dengan tujuan tertentu). dan *snowballing sampel* atau sampel bola salju (pengambilan sampel berdasarkan rekomendasi dari informan yang lebih dulu ditentukan) (Alston dan Bowles, 2003: 87-90).

Penulis menggunakan teknik sampling purposif yang merupakan bagian dari sampel tidak acak/*non-probability sampling* untuk menentukan informan. Teknik sampling purposif membolehkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan sebuah tujuan. Peneliti memiliki kerangka pengetahuan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa sebuah kelompok atau orang tertentu penting dan dirasa cocok untuk isu yang akan dipelajari (Alston dan Bowles, 2003: 89-90). Teknik sampling purposif memiliki ciri (Alston dan Bowles, 2003: 90):

- a) sampel dipilih untuk tujuan tertentu
- b) sampel memberikan wawasan tentang sebuah isu terkait dengan area studi
- c) jumlah sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan topik riset.

Teknik sampling purposif ini dipilih penulis karena yang pertama penelitian ini tidak bermaksud menggeneralisasikan hasilnya dan kedua karena penulis sudah mempunyai asumsi sebelumnya terkait dengan kriteria pemilihan informan. Syarat bahwa informan harus beragama Islam kemudian dipadukan dengan asumsi penulis tentang hal-hal apa saja yang mungkin mempengaruhi pembacaan informan. Faktor tersebut antara lain jenis kelamin, status perkawinan, afiliasi dengan organisasi tertentu, tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan orientasi seksual. Keragaman informan akan dilihat dari perbedaan mereka dalam kriteria-kriteria tersebut.

### 1.6.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam melibatkan interaksi dalam bentuk percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang sudah dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendiskusikan sebuah topik tertentu.

Wawancara mendalam bertujuan mengetahui bagaimana pengalaman orang lain dan bagaimana mereka memberi makna atas pengalaman tersebut, seperti yang dikatakan Seidman dalam bukunya *Interviewing as Qualitative Research*:

The purpose of in-depth interviewing is not to get answers to questions, nor to test hypotheses, and not to “evaluate” as the term is normally used. At the root of in-depth interviewing is an interest in understanding the experience of other people and the meaning they make of that experience (Seidman, 1991: 3).

Penulis memilih teknik ini karena penulis perlu berinteraksi secara langsung dengan informan untuk mengetahui pola pembacaan mereka terhadap kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas serta alasan-alasan atas sikap mereka. Teknik ini juga dipilih karena persoalan gender dan seksualitas bisa jadi sensitif bagi sebagian orang sehingga seseorang akan merasa lebih nyaman berbicara tentang hal itu tidak dalam situasi yang terbuka dan banyak orang lain yang mendengarkan.

Tipe wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interviews*). Dalam

wawancara semi-terstruktur, pewawancara memiliki daftar tentang isu yang akan ditanyakan kepada informan (orang yang diwawancarai). Namun, dalam wawancara tipe ini, orang yang diwawancarai bisa mengembangkan idenya dan berbicara lebih luas tentang isu yang diangkat. Hal ini dapat membantu pewawancara untuk melihat alasan-alasan informan tentang pendapat mereka.

Penelitian ini membahas kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas dalam konteks ajaran agama Islam, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan akan berkaitan dengan isu seputar kepemimpinan perempuan, partisipasi publik perempuan (kebebasan berpendapat, kegiatan ekonomi, izin suami ketika akan bepergian, kehadiran muhrim ketika seorang perempuan akan bepergian), kebebasan menentukan pasangan, poligami, gugat cerai, dan otoritas perempuan atas tubuhnya. Dalam mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hal-hal tersebut, penulis akan selalu merujuk pada adegan atau cerita dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*. Daftar pertanyaan disertakan pada bagian lampiran.

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian yang berfokus pada *decoding* penonton ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Menentukan teori, definisi konsep-konsep yang dipakai, serta metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

- 2) Mengidentifikasi kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas.
- 3) Membuat daftar pertanyaan berdasarkan kode-kode dominan yang telah ditemukan.
- 4) Memilih informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- 5) Mewawancari informan.
- 6) Menyusun transkrip wawancara.
- 7) Menganalisis hasil wawancara dan mengidentifikasi posisi pembacaan informan dengan memasukkannya ke dalam posisi pembacaan dominan-hegemonik (*preferred reading*), negosiasi (*negotiated reading*), atau oposisional (*oppositional reading*).

Proses utama untuk menarik kesimpulan berdasarkan data terletak pada poin menganalisis hasil wawancara. Menurut Bogdan dan Biklen (Bogdan dan Biklen, 1992 dalam Usman dan Akbar, 2008: 84), analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulatif menambah pemahaman peneliti tentang apa yang ingin ditemukan. Nasution (1988, dalam Usman dan Akbar 2008: 84) menyatakan bahwa analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi

artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman (Usman dan Akbar, 2008: 84-88):

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengode, menelusuri tema, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi (Usman dan Akbar, 2008: 84-85).

b. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif (Usman dan Akbar, 2008: 87). Dalam penelitian *decoding* dengan model yang dikembangkan oleh Stuart Hall, data disajikan dengan sekaligus mengklasifikasikannya ke dalam posisi pembacaan dominan, negosiasi, atau oposisional. Penulis mengidentifikasi posisi pembacaan informan ini dengan beberapa cara, yaitu:

- melihat seberapa besar derajat kesimetrisan/ketidaksimetrisan sikap informan dengan kode-kode dominan teks *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas.
- membandingkan level penerimaan/penolakan kode-kode dominan antarinforman.
- menggunakan sudut pandang feminisme Islam<sup>14</sup> seperti yang digunakan oleh *encoder* untuk mengerangkai isu-isu gender dan seksualitas dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*<sup>15</sup>.

Kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* yang dimaksud di sini adalah premis-premis yang ditarik penulis dari film tersebut berdasarkan cara film menyikapi persoalan gender dan seksualitas.

<sup>14</sup> Feminisme Islam adalah sebuah aliran baru dalam feminisme menyikapi besarnya peran agama dalam melegitimasi budaya patriarkal. Dalam konteks agama Islam, tujuan aliran feminisme ini adalah mereinterpretasi ajaran agama yang seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan beragama, sosial, maupun politik.

<sup>15</sup> Keberpihakan *encoder* atau pembuat teks *Perempuan Berkalung Sorban* terhadap ide-ide feminisme dapat dilihat pada pembahasan (bab III) di sub-bab "Sudut Pandang Pembuat Teks". Mereka tidak dengan eksplisit menyatakan diri sebagai penganut feminisme Islam, tetapi hal tersebut terbaca dari beberapa pernyataan Abidah El-Khalieqy (penulis novel), Ginatri S. Noer (penulis naskah), dan Hanung Bramantyo (sutradara). Abidah El-Khalieqy, dalam wawancara dengan *Koran Tempo* edisi 15 Februari 2009, menyatakan ia mendukung feminisme karena melihat kondisi perempuan di Indonesia yang masih termarginalkan. Salah satu penyebabnya menurutnya adalah karena penafsiran yang patriarkis tentang ajaran agama Islam. Ia menginginkan dekonstruksi penafsiran ajaran agama Islam; ia menyatakan novel *Perempuan Berkalung Sorban* menawarkan upaya reinterpretasi Alquran dan rekonstruksi fikih.

Semakin besar derajat kesimetrisan sikap informan dengan kode-kode dominan dan semakin tinggi level penerimaannya dibandingkan dengan informan lain, semakin besar kecenderungannya dalam posisi dominan. Sebaliknya, semakin besar derajat kesimetrisan sikap informan dengan kode-kode dominan dan semakin tinggi level penolakannya dibandingkan dengan informan lain, semakin besar kecenderungan informan ke arah posisi pembacaan oposisional.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif (Usman dan Akbar, 2008: 87). Pada tahap ini, penulis harus menemukan makna dari data yang sudah dikumpulkan serta posisi pembacaan informan terhadap kode-kode dominan film *Perempuan Berkalung Sorban* tentang gender dan seksualitas yang sudah diidentifikasi. Karena semua premis atau kode dominan tersebut menyuarakan ide-ide kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, penulis akan memetakan kecenderungan posisi pembacaan informan berdasarkan penerimaannya terhadap ide-ide kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam film *Perempuan Berkalung Sorban*. Penulis juga akan menghubungkan posisi pembacaan informan dengan latar belakangnya sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembacaan informan.